

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan masyarakat (publik) terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan/targetkan (Mardiasmo, 2004)

Disisi lain, organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi-organisasi sektor publik tersebut, kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep manajemen publik modern atau lebih dikenal dengan *New Public Management* (Mardiasmo, 2004)

Tujuan *New Public Management* adalah untuk merubah administrasi publik dikelola seperti pada sektor private (perusahaan). Administrasi publik sebagai penyedia jasa jaga bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan

layanan yang efisien dan efektif. Namun, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi sebuah perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik di belanjakan secara ekonomis efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi (Mahsun, 2006)

Pengukuran kinerja dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan organisasi dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan sistem imbalan (reward) atau sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan atau organisasi dalam rangka menciptakan *good governance*. Menurut Simons (BPKP, 2000), menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi, sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas

barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Selama 41 hari magang di BAPPEDA Kabupaten Pamekasan peneliti mengoreksi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan tahun 2012 setiap instansi di kabupaten pamekasan dan hasil kinerja BAPPEDA yang telah dilaksanakan disesuaikan dengan hasil dari badan pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Hasil kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA pada tahun 2012 menunjukkan hasil yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja yang telah terealisasi atau dari presentase kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk lebih mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, judul yang akan digunakan oleh peneliti adalah: "**Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Studi BAPPEDA Kabupaten Pamekasan)**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengukuran kinerja BAPPEDA Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran kinerja BAPPEDA Kabupaten Pamekasan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, di antaranya yaitu:

1. Bagi Pemda Pamekasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan aktivitas pemerintahan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

2. Bagi peneliti

Sebagai bahan penyusunan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat Ahli Madya bidang Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dan sebagai penerapan dari mata kuliah yang pernah dipelajari sebelumnya serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti.

3. Bagi pihak lain

Sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dan akan menjadi input guna menambah wawasan dan pengetahuan untuk acuan penelitian sejenis berikutnya.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di Jl. Jokotole No. 5 Pamekasan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Bulan Januari sampai dengan Februari 2013.